



## KPU Dirikan Posko di 45 Titik

**JOGJA** - Enam bulan jelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja mendirikan posko perlindungan hak pemilih. Posko tersebut akan dibuka di 45 titik, seperti di asrama mahasiswa hingga kampus yang terdapat banyak mahasiswa asal luar daerah.

Komisioner KPU Kota Jogja Sri Surani mengungkapkan tujuan dari pembangunan posko ini untuk melayani pemilih yang belum terdaftar. Harapannya dengan dibuka posko tersebut hak pilihnya tidak hilang. "Dengan posko ini masyarakat bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum," jelasnya saat berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Jogja kemarin (17/10).

Untuk lokasi-lokasi yang akan dibangun posko, Rani sapaanya, mengungkapkan akan dibangun di beberapa titik. Lokasi yang akan di sasar nantinya merupakan daerah yang mungkin jarang tersentuh oleh pendataan. Seperti asrama, lapas, panti asuhan. "Nantinya juga akan didirikan posko di dua kampus besar (UAD dan UKDW) di Jogjakarta untuk melayani mahasiswa dari luar daerah," jelasnya.

Rani juga mengingatkan untuk pemilih yang berasal dari luar daerah, disarankan untuk membawa atau mengurus surat A5. Surat ini agar memudahkan pemilih dari luar daerah agar bisa berpindah tempat memilih karena keadaan tertentu seperti kuliah atau kerja.

"Pemilih luar daerah yang kebanyakan mahasiswa. Dihimbau bisa mengurus surat



**AYO DICEK:** Komisioner KPU Kota Jogja menemui Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti di rumah dinas untuk ikut menghimbau warga Kota Jogja melakukan verifikasi data pemilih ke kelurahan.

**Pemilih luar daerah yang kebanyakan mahasiswa. Dihimbau bisa mengurus surat ini jauh hari sebelum hari-H pemilihan."**

**SRI SURANI**  
 Komisioner KPU Kota Jogja

ini jauh hari sebelum hari-H pemilihan," ujarnya.

Rani juga mengatakan akan melakukan gerakan massal yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar mau datang ke kelurahan melakukan verifikasi data pemilih.

"Harapannya masyarakat mau berbondong-bondong datang kelurahan untuk memastikan identitasnya," terangnya.

Hingga saat ini KPU Kota Jogja masih menemukan 500 data ganda, ditambah 400 data ganda versi Bawaslu dan 200 data ganda hasil temua partai politik. "Tapi ada data yang beririsan," katanya.

Sementara itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mendukung program perlindungan hak pemilih ini. Dia mengungkapkan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya.

"Karena besok masyarakat mempunyai hak untuk memilih fima surat suara, jangan sampai kehilangan hak pilihnya," pesannya. (cr5/prazl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005